

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK SHOPEE
PINJAM DARI *MARKETPLACE***
(Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah
Sukarame Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh
Aulia Azhar
NPM 1721030014

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK SHOPEE
PINJAM DARI *MARKETPLACE***

(Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah
Sukarame Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. H A. Khumaidi Jaf'ar, S.A.g., M.H
Pembimbing II : Anis Sofiana M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Utang piutang adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Sebagaimana yang terjadi di shopee pinjam dari *marketplace* shopee yang digunakan pengguna di kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung. Shopee pinjam adalah produk dari shopee untuk memberikan pinjaman tunai yang ditawarkan ke pengguna dengan pengajuan mudah dan cepat serta dengan cicilan bulanan. Pinjaman yang disertai bunga saat pengembalian dan ada denda saat keterlambatan dalam pembayaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung dan untuk Mengetahui Tinjauan hukum Islam tentang praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research), sifat penelitian ini bersifat deskriptif, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian dilapangan untuk mendapatkan bukti terkait.

Praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee ini adalah peminjaman uang dibayar hingga berapa kali cicilin mulai dari 2 bulan, 3bulan dan 6 bulan dengan bunga yang berbeda-beda mulai dari 10% sampai dengan 30%. Tanggal pembayaran setiap tanggal 5 di bulan berikutnya setelah melakukan peminjaman. Jika terlambat denda sebesar 3% dari jumlah yang ingin dibayar. Tinjauan hukum Islam tentang praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna shopee pinjam di kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung. Di shopee pinjam ini tidak menerapkan syarat *qardh* yaitu tidak adanya keuntungan bagi si muqaridh (yang memberikan utang) dan shopee pinjam ini mengandung bunga yang berarti riba Padahal sudah jelas dalam Islam riba dilarang. Berdasarkan penelitian ini dapat di kemukakan bahwa praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee ini tidak memenuhi syarat *qardh* atau utang piutang yaitu tidak adanya keuntungan bagi si muqridh (yang memberikan utang) dan shopee pinjam di aplikasi shopee ini mengandung riba yang dilarang Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Aulia Azhar
NPM : 1721030014
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 11 Juli 2021
Penyusun

Aulia Azhar
NPM. 1721030014



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBAYARAN SEWA MENYEWA JASA
INTERNET DENGAN SISTEM PAKET (Studi di
Disney Net Teluk Bandar Lampung)**

Nama : **Sultan Al Kahfi**
NPM : **1721030268**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

NIP. 197408162003122004

Helma Maraliza, S.E.L., M.E.Sy

NIP.

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame - Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN SEWA MENYEWA JASA INTERNET DENGAN SISTEM PAKET (Studi Di Disney Net Teluk Bandar Lampung)** disusun oleh **Sultan Al Kahfi, NPM. 1721030268**, Program Studi **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 16 November 2021**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H

NIP.197208262003121002

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



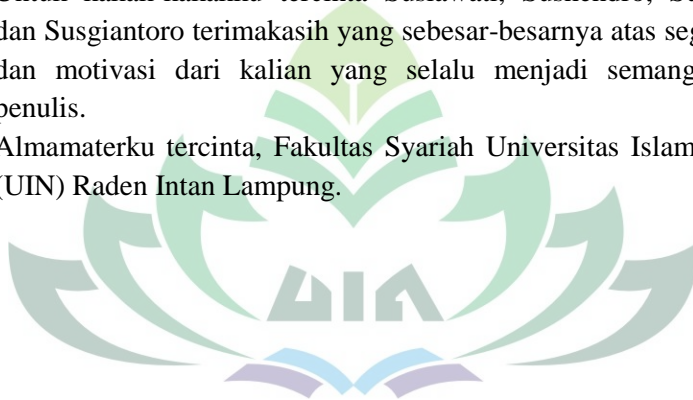
“orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

(Al Baqarah : 275)

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Kedua orang tua ku yang tercinta, Bapakku tercinta Suparmin dan Ibuku tercinta Ruwiyah, terimakasih sebesar-besarnya atas doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih atas segala jasa, pengorbanan, motivasi, yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas, serta curahan kasih sayang yang telah memberikan kepadaku untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan semangat untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini serta keberhasilan kedepannya.
2. Untuk kakak-kakakku tercinta Susiawati, Sushendro, Susgiardi, dan Susgiantoro terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala doa dan motivasi dari kalian yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Aulia Azhar, di lahirkan di Desa Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung pada tanggal 08 Februari 1999 anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan bapak Suparmin dan ibu Ruwiyah. Pendidikan dimulai dari:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Sumber Agung pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Ambarawa pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ambarawa pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017.
4. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017.

Bandar Lampung, 11 Juli 2021
Penulis

Aulia Azhar
NPM 1721030014

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari *Marketplace* Shopee (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarama Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H A Khumaidi Ja'far, S.Ag.M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I Selaku sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa dan mahasiswinya.
4. Bapak Dr.H A Khumaidi Ja'far, S.Ag.M.H Selaku pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana M.S.I Selaku pembimbing II yang selalu memberi masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk

senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah membantu selama masa perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2017, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah I Angkatan 2017, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna, canda tawa dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 11 Juli 2021
Penulis

Aulia Azhar
NPM 1721030014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian dan Subfokus penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Aplikasi Shopee Pinjam	13
1. Pengertian Aplikasi Shopee Pinjam	13
2. Sejarah Shopee	14
3. Manfaat Aplikasi Shopee Pinjam	15
B. Utang Piutang	16
1. Pengertian Utang Piutang.....	16
2. Dasar Hukum Utang Piutang.....	19
3. Rukun Dan Syarat Utang Piutang	25
4. Waktu Dan Sistem Pembayaran Utang Piutang Dalam Islam.....	32

5. Pembatalan Perjanjian Dalam Utang Piutang	38
6. Denda Dalam Utang Piutang	41
C. Riba.....	41
1. Pengertian Riba	41
2. Macam-Macam Riba	43
3. Proses Pelanggaran.....	45
4. Sebab-Sebab Haramnya Riba.....	48
5. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Tentang Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung	53
1. Sejarah Berdirinya Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung	53
2. Visi Misi Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung	53
3. Tata Tertib Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung	53
4. Pengelolaan kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung	54
B. Praktik Shopee Pinjam dari <i>Marketplace</i> Shopee Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung.....	54
1. Syarat Dan Ketentuan Mengaktifkan Shopee Pinjam	54
2. Cara Penggunaan Shopee Pinjam.....	56

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Shopee Pinjam dari <i>Marketplace</i> Shopee Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan PuriArrifah Sukarame Bandar Lampung	65
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam dari <i>Marketplace</i> Shopee Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame BandarLampung	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR RUJUKAN

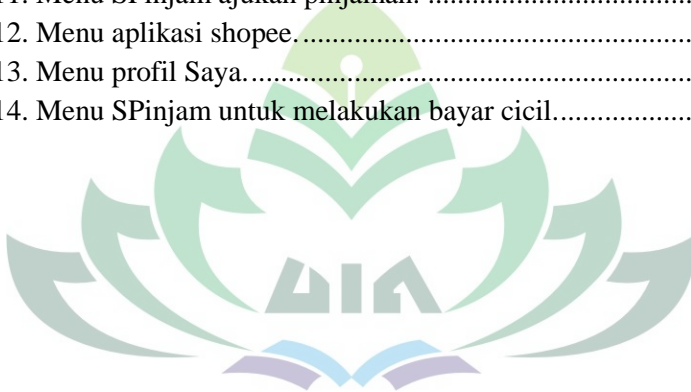
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

1. Menu aplikasi shopee.....	14
2. Menu shopee pinjam yang telah terdaftar.....	55
3. Menu aplikasi shopee.....	56
4. Menu profil Saya.....	57
5. Menu SPinjam yang akan di aktifkan.....	57
6. Menu SPinjam memasukan nomer handphone.....	58
7. Menu SPinjam memasukan kode verifikasi.....	58
8. Menu SPinjam memasukan kontak darurat.....	58
9. Menu SPinjam verifikasi wajah.....	59
10. Menu SPinjam muncul pop-up.....	59
11. Menu SPinjam ajukan pinjaman.....	60
12. Menu aplikasi shopee.....	61
13. Menu profil Saya.....	61
14. Menu SPinjam untuk melakukan bayar cicil.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Kartu konsultasi bimbingan skripsi
2. Surat keterangan wawancara
3. Daftar pertanyaan
4. Hasil wawancara
5. Dokumentasi wawancara
6. Surat rekomendasi penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu atap



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul : Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari *Marketplace* Shopee (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung).

Analisis adalah suatu proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan atau kebenarannya, atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹

Hukum Islam dalam pengertian ini adalah hukum ekonomi syariah yaitu hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam masalah harta.²

Praktik shopee pinjam adalah produk dari shopee untuk memberikan pinjaman tunai yang ditawarkan ke penggunaanya dengan pengajuan mudah dan cepat serta dengan cicilan bulanan.³

Marketplace shopee menurut ahli Opiida adalah media online berbasis internet tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual, dimana pembeli bisa mencari penjual sebanyak mungkin sesuai kriteria dengan harga pasar.⁴

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah pemeriksaan yang teliti

¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta :Gitamedia 2005), 50.

² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 3.

³Siti, Pengguna Shopee ,wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 28 Mei 2021.

⁴ Diah Ayu, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online (Studi Kalangan Mahasiswa UINSA)”. (Skripsi Program Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UINSA Surabaya, 2018)

terhadap praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung.

B. Latar Belakang

Pada zaman seperti sekarang ini dimana teknologi sedang maju-majunya, dan banyak teknologi yang sedang berkembang pesat. Terutama teknologi informasi dan komunikasi, setiap orang dapat mengakses dan menggunakan layanan internet yang sudah tersedia sedemikian canggihnya.

Pada kehidupan manusia pasti akan selalu terlibat untuk melakukan kegiatan bermuamalah untuk mencukupi segala keperluan dalam hidup. Salah satunya kegiatan bermuamalah yang tidak luput dalam kehidupan manusia yaitu melakukan hutang piutang.⁵ Dimana hutang piutang adalah kegiatan bermuamalah untuk menolong antar sesama manusia sehingga umat Islam boleh melakukannya apabila telah memenuhi syarat hutang piutang yang benar dan sesuai dengan Islam.

Hutang piutang pada dasarnya hukumnya sunnah, tetapi bisa menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkan, jadi hutang piutang diartikan menjadi tolong-menolong.⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maiddah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Maiddah [5:2])

Ayat ini bermakna manusia dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan karena manusia tidak dapat hidup sendiri, saling membutuhkan satu sama lainnya.

⁵Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Semarang: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor : Kencana, 2003), 222.

Hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dengan jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang di hutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁷ Jika ada tambahan waktu pengembalian hutang itu lebih dari jumlah semestinya harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad maka tambahan dari jumlah yang semestinya itu tidak halal atas piutang yang mengambilnya.⁸ Sebagaimana hutang piutang yang ada di aplikasi shopee, pada zaman modern seperti sekarang ini praktik hutang piutang dapat dengan mudah dilakukan bahkan melalui media online seperti shopee pinjam ini.

Shopee pinjam dapat diakses dengan mudah untuk orang yang ingin meminjam uang, hanya perlu mengisi persyaratan yang telah ditentukan dan pencairan dana pun langsung didapatkan di hari yang sama juga, melalui transfer ke rekening pemilik akun shopee. Pelaksanaan peminjamannya dimana pengembalian uangnya dengan bertambahnya dari nominal yang dipinjam atau dengan bahasa sehari-hari yaitu bunga (tambahan). Bunga atau tambahan yang dikembalikan mencapai 30% dari nominal yang dipinjam, serta saat peminjaman uang tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar 1% diawal peminjaman.⁹

Hutang piutang harus ada unsur kejelasan dalam pengembalian. Dalam Islam telah dijelaskan hutang piutang harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan. Namun pada aplikasi shopee ini tidak menerapkan sedemikian rupa, dan telah mengandung unsur riba yang pada dasarnya praktik riba dilarang, karena dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dan efek negatif lainnya dari riba itu sendiri.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 167.

⁸ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978), 414.

⁹ Siti, Pengguna Shopee, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 28 Mei 2021.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka dipandang baik dilakukan penelitian tentang hal praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah judul **Analisis Hukum Islam Praktik Shopee Pinjam dari Marketplace Shopee (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung).**

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini memfokuskan untuk meneliti bagaimana praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee dan pandangan hukum Islam tentang praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. untuk mengetahui praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam tentang praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik

Secara teoritik berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi-informasi dari penelitian yang sebelumnya yang relevan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai pertimbangan dalam mencari bagian acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini.

1. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Letter Pada E-Commerce (studi pada E-Commerce)." Skripsi di susun oleh Marinda Agiesthia M (2020). Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel. Fokus kajian bagaimana praktik dan hukum Islam pinjaman uang elektronik shopee *pay letter* pada *e-commerce*. Skripsi Marinda menyimpulkan bahwa ,praktik peminjaman uang elektronik melalui shopee *pay letter* memberikan kemudahan kepada pengguna shopee dan shopee *pay letter* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat bebrapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna, maka shopee *pay letter* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur merugikan orang lain.¹⁰ Persamaan dari skripsi yang disusun penulis adalah pada landasan teorinya yang membahas

¹⁰Marinda Agesthia "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Letter Pada E-Commerce (studi pada E-Commerce)." (Skripsi Program Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2020).

tentang pinjaman serta riba dan pada aplikasi yang menjadi tempat penelitian, sedangkan perbedaannya terdapat pada fitur di aplikasinya, penulis melakukan penelitian pada fitur shopee pinjamnya sedangkan penelitian terdahulu tentang shopee *pay letter*.

2. Skripsi yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi pada Aplikasi Uang Teman).” Skripsi di susun oleh Mikhrozul Rachmat (2019). Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Fokus kajian bagaimana praktik dan hukum Islam Hutang Piutang secara online. Skripsi Mikhrozul menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang secara online melalui aplikasi uang teman faktanya transaksi tersebut tidak berdasarkan niat untuk tolong menolong melainkan mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi pemberi hutang, bunga besar dan denda yang besar pula. Hal itu sangat merugikan nasabah. Dalam pandangan hukum Islam transaksi seperti ini sangat diharamkan terkait adanya riba di dalam hutang piutang.¹¹ Persamaan dari skripsi yang disusun penulis adalah pada landasan teorinya yang membahas tentang pinjaman serta riba, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti objek yang penulis teliti adalah aplikasi shopee sedangkan objek peneliti sebelumnya adalah aplikasi uang teman.
3. Skripsi yang berjudul” Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo dalam perspektif hukum Islam (Studi pada Aplikasi Kredivo).” Skripsi di susun oleh Ayu Putri (2020). Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga. Fokus kajian bagaimana praktik dan perspektif hukum Islam tentang hutang piutang melalui media online kredivo. Skripsi Ayu Putri menyimpulkan bahwa mekanisme kredit melalui media online pada aplikasi kredivo menurut hukum Islam adalah tidak sah, karena aplikasi tersebut sudah jelas terdapat adanya biaya administrasi, denda dan bunga yang hal tersebut terdapat

¹¹Mikhrozul Rachmat ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi pada Aplikasi Uang Teman).” (Skripsi Program Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019).

adanya riba.¹² Persamaan dari skripsi yang disusun penulis adalah pada landasan teorinya yang membahas tentang pinjaman serta riba, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti objek yang penulis teliti adalah aplikasi shopee sedangkan objek peneliti sebelumnya adalah aplikasi Kredivo.

Meskipun pada dasarnya judul skripsi di atas memiliki pembahasan yang hampir sama, namun substansi yang diajukan dalam penelitian ini berbeda. Pada judul penelitian ini penulis meninjau dari hukum Islam tentang praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee. Selain itu objek penelitian pada skripsi ini berbeda dengan relevansi di atas, penelitian ini berfokus pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), merupakan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden.¹³ Guna mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori mengenai hutang-piutang. Penelitian ini juga menggunakan *library research* sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

¹²Ayu Putri "Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo dalam perspektif hukum Islam (Studi pada Aplikasi Kredivo)." (Skripsi Program Sarjana Hukum di Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2020).

¹³ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 4.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya kemudian dianalisis dan diinterpretasi, bentuknya berupa survei dan studi perkembangan.¹⁴ Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana Analisis Hukum Islam tentang Praktik Shopee Pinjam dari *Marketplace* Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya bisa peneliti dapatkan dari sumber pertama atau asli.¹⁵ Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan yaitu pengguna aplikasi shopee di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung sebanyak 5 (lima) orang yang pernah menggunakan shopee pinjam di aplikasi shopee dan 1 (satu) orang pemilik kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan bukan dari sumber pertama tetapi peneliti mendapatkannya dari sumber kedua atau melalui perantara orang lain.¹⁶ Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain : Al-Qur'an, hadist, buku, kitab-kitab fiqh, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹⁷ Informan ini

¹⁴ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 8.

¹⁵ Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung : Rosda, 2018), 227.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 85.

dibutuhkan untuk mengetahui kondisi sesuai dengan fenomena yang terjadi. Informan yang diambil dalam penelitian ini yaitu pengguna aplikasi shopee di Kosan Puri Arrifah Sukarama Bandar Lampung sebanyak 5 (lima) orang yang pernah menggunakan shopee pinjam di aplikasi shopee dan 1 (satu) orang pemilik kosan Puri Arrifah Sukarama Bandar Lampung, dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi.

4. Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan.¹⁸ Metode yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁹ Observasi dilakukan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam Hal ini penulis akan mengobservasi praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarama Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi terkait masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.²⁰ Untuk memperoleh data yaitu dilakukan wawancara dengan pihak yang pernah menggunakan shopee pinjam di aplikasi shopee, di Kosan Puri Arrifah Sukarama Bandar Lampung dan satu orang pemilik kosan Puri Arrifah Sukarama Bandar Lampung. Penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara

¹⁸ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia, 2014),74.

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia, 2014),154.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*,.... 188.

langsung kepada para pihak yang bersangkutan yaitu dengan pihak yang pernah menggunakan shopee pinjam di aplikasi shopee.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²¹ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku fiqh serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian serta kebutuhan pengambilan keputusan.²² Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu kegiatan untuk melakukan pengecekan isian formulir atau alat ukur penelitian yang kita gunakan. Apakah data yang terkumpul sudah lengkap dan benar.

b. Sistematika Data (*Sistemizing*)

Sistematika data yaitu menyusun ulang data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²³

6. Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan praktik shopee pinjam dari

²¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2020), 75.

²² Moh Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 75.

²³ *Ibid.*

marketplace shopee yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam. Setelah analisis data selesai maka hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan yang logis dan sistematis. Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berupa praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung.

Pola pikir yang digunakan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁴ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung dan analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut dibagi dalam 5 (lima) bab meliputi:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum yang berupa pola dasar penulisan skripsi ini meliputi penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang utang piutang dan riba yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, waktu pembayaran, macam-macam riba, sebab haramnya riba, hal yang menimbulkan riba.

Bab III : Merupakan hasil dari penelitian tentang shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung yang

²⁴Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Renika Cipta, 2015), 182.

memaparkan sub bab yang terdiri dari profil, sejarah berdiri aplikasi shopee dan praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam di kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung.

Bab IV : Menjelaskan mengenai praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna di kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Bab V : Merupakan bab penutup yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aplikasi Shopee Pinjam

1. Pengertian Aplikasi Shopee Pinjam

Perkembangan dalam transaksi peminjaman uang sekarang ini semakin berkembang. Apalagi sekarang ini sudah banyak yang namanya peminjaman uang secara online. Dan peminjaman uang secara online pun terus berkembang. Keuangan merupakan hal yang sangat penting, karena jika tidak ada perencanaan keuangan bagaimana kita bisa menghitung besarnya pengeluaran dan pendapatan yang kita miliki. Namun bahkan dengan sudah adanya perencanaan keuangan sekalipun namun juga tetap tidak bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan hidup, maka alternatif lainnya adalah dengan melakukan pinjaman atau yang biasa disebut berhutang.

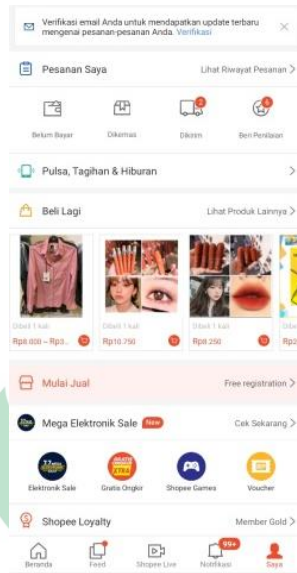
Zaman seperti sekarang ini banyak sekali perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang, terutama peminjaman secara online untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mulai untuk urusan pribadi dan urusan lainnya, yang tidak bisa terpisahkan dengan namanya uang. Dan sekarang ini proses peminjaman yang relatif cepat dan mudah, dan jangka waktunya pun dapat ditentukan sesuai dengan keinginan. Apalagi syarat-syarat yang diperlukan tidak susah, aman dan terpercaya. Dan salah satunya aplikasi ternama shopee yang juga menyediakan jasa peminjaman uang dengan mudah dan cepat.

Seperti yang diketahui *Marketplace* shopee menurut ahli Opiida adalah media online berbasis internet tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual, dimana pembeli bisa mencari penjual sebanyak mungkin sesuai kriteria dengan harga pasar.¹ Atau yang dengan mudahnya kita sebut tempat akses mempermudah untuk berbelanja. Namun di aplikasi shopee ini ternyata tidak hanya

¹ Diah Ayu, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online: Studi Kalangan Mahasiswa UINSA" (Skripsi, UINSA Surabaya, 2018), 3.

untuk berbelanja namun juga dapat melakukan transaksi pinjaman yang sangat mudah dan cepat serta terjamin.

Aplikasi shopee menyediakan berbagai menu di tampilannya info Beranda, Feed, Shopee Live, Notifikasi, dan Saya, tampilan info Saya memiliki pilihan info lagi mulai dari shopee loyalty, sPayletter dan terutama yang masih baru ini Pinjam.



Gambar 1
Menu aplikasi Shopee

Sumber: Screenshot marketplace shopee

Shopee Pinjam adalah produk dari shopee untuk memberikan pinjaman tunai yang ditawarkan ke penggunaanya dengan pengajuan mudah dan cepat serta dengan cicilan bulanan.²

2. Sejarah Shopee Pinjam

Pada tahun 2015, shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai *marketplace consumer to consumer (C2C)*. Namun kini mereka telah beralih ke model hibrid *C2C* dan *business to consumer (B2C)* semenjak

² Siti, "Praktik Shopee Pinjam Pada Pengguna Aplikasi Shopee", Wawancara, Mei 28, 2021.

meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama.

Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar, naik 206 persen dari tahun sebelumnya. Shopee memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar US\$2,7 miliar, naik 153 persen dari tahun 2017.

Salah satu bentuk transaksi di Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ke-3 yang paling banyak dikunjungi di Q4 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App store.

Demikian pula di kalangan konsumen di Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia (73%), diikuti oleh Tokopedia (54%), Lazada (51%), dan Instagram (50 %).

Pada April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee. Program yang diberi nama ShopeeFOOD ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta.³

3. Manfaat Aplikasi Shopee Pinjam

Manfaat utama peminjaman secara online di aplikasi shopee pinjam untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mulai untuk urusan pribadi dan urusan lainnya, yang tidak bisa terpisahkan dengan namanya uang. Dan sekarang ini proses peminjaman yang relatif cepat dan mudah, dan jangka waktunya pun dapat ditentukan sesuai dengan keinginan. Apalagi syarat-syarat yang diperlukan tidak susah, aman dan terpercaya. Dan salah satunya aplikasi ternama shopee yang

³ Wikipedia, "Sejarah Shopee" (on-line), tersedia di:
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee.html> (7 juli 2021)

juga menyediakan jasa peminjaman uang dengan mudah dan cepat.⁴

B. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Dalam Islam utang piutang dikenal dengan istilah *al-qardh*. *Qardh* secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha* asy-syai'-yaqridhu, yang berarti memutuskannya. Adapun *qardh* secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁵

Dengan demikian *al-qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan utang.⁶ Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁷ Jika ada tambahan waktu mengembalikan utang itu lebih dari jumlah semestinya harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad maka tambahan dari jumlah yang semestinya, tidak halal atas piutang mengambilnya.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁹

⁴ Siti, "Praktik Shopee Pinjam Pada Pengguna Aplikasi Shopee", *Wawancara*, Juli 7, 2021.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 331.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 167.

⁸ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978), 414.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 689.

Pengertian utang piutang sama dengan pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi : “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”¹⁰

Wahbah al-zuhaili mendefinisikannya secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkannya. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.

Qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹¹

Adapun utang piutang menurut para ahli fiqh yaitu :

Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.¹²

a. Golongan Hanafiyah berpendapat *qardh*, yaitu

“Akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama”.

b. Golongan Syafi’iyah menjelaskan *qardh* , yaitu :

“Syafi’iyah berpendapat bahwa *qardh* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”

¹⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 451.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*,170.

¹² *Ibid*, 169.

c. Hanabilah mengemukakan *qardh* adalah:

“Menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya”.

d. Sayyid Sabiq menjelaskan *qardh*, yaitu :

“Harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar”.¹³

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian peminjam akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama.¹⁴ Maka lebih jelasnya *qardh* atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak yang menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.¹⁵ *Qardh* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا
الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهٖمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۚ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ
وَالْعُدُوْنِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

¹³ Rozalida, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 229-230.

¹⁴ Chairuman Pasaribu, Suhawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta:

Sinar Grafika, 1994), 136.

¹⁵ Rozalida, *Fikih Ekonomi Syariah*,230.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maiddah [5:2])

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang harus di dasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa Allah merupakan amal saleh dan memberi infaq *fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasan yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar dapat gantinya.¹⁶

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Landasan hukum disyariatkannya *qardh* berdasarkan Al-Qur’an, Al-Sunnah, Ijma dan Fatwa DSN MUI tentang *qardh*.

a. Landasan berdasarkan Al-Qur’an adalah :

1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 245 :

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 222.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨٥﴾

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah[2:245])

Memberikan utang pada seseorang harus didasari dengan niat tulus serta ikhlas untuk menolong sesama manusia. Ayat ini memiliki makna bahwa memberikan utang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangan dalam melakukannya. Pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memberi pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan pinjaman.

Maka sudah jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut hal baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal utang piutang ataupun lainnya selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

2) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2:280])

Maksud ayat di atas dimana kita diajarkan memberikan tambahan waktu bagi orang yang berhutang sampai ia mampu untuk membayarnya. Dan apabila kamu menyedekahkan maka akan jauh lebih baik.

3) Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 12

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾



dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik[406] Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. (QS. Al- Maidah [2:12])

b. Landasan dari Al-Sunnah antara lain adalah :

1) Hadis Riwayat Abu Rafi'

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ

يَقْضِي الرَّجُلُ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا
خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

“Dari Abu Rafi’, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi’ kembali kepada Beliau sambil berkata, “Aku tidak mendapatkan onta muda kecuali onta yang sudah dewasa. ”Beliau bersabda, “Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. ”(HR. Muslim)¹⁷

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadis tersebut bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Hal ini berarti bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

2) Hadis riwayat Ibnu Mas’ud:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ

“Dari Ibnu Mas’ud berkata, “Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama. ” (Hadis hasan HR. Ibnu Majah)¹⁸

c. Landasan dari Ijma antara lain adalah :

Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* dibolehkan dalam islam. Hukum *qardh* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Semarang: Petraya Mitrajaya, 2001), 128.

¹⁸ *Ibid*.

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qardh* disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena didalam *qardh* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qardh* merupakan pinjaman tanpa syarat.¹⁹ Landasan *qardh* dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, disebutkan dalam KHES pasal 612-617. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Meskipun demikian, utang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang di hukuminya boleh, makruh, wajib dan terkadang haram. Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.²⁰ Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Dan hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Jika seseorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.²¹

Al-qardh disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seorang yang

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*,172.

²⁰ *Ibid*, 173.

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 231.

mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang di hadapi orang lain.²²

Haram pula bagi pemberi utang yang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan utang yang dia berikan, utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Memberikan utang terkadang dapat menjadi wajib seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkan. Dan tidak sah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena masyarakat satu sama lain membutuhkan pertolongan. Akad dalam utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain.²³

Aktifitas manusia bernilai ekonomi dalam Islam dikenal dengan istilah *Tasharruf*, salah satu bentuknya adalah bertransaksi atau berakad yang merupakan landasan hukum bagi para pihak yang akan mengikatkan diri pada suatu kesepakatan usaha dengan diktum-diktum kesepakatan tertentu yang dibenarkan Syara'. Sebagai suatu perjanjian bernilai ekonomi yang memiliki kekuatan hukum, suatu transaksi memiliki syarat dan rukunnya.

Oleh karena itu, bahwa melebihi pembayaran utang dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumnya haram tetapi melebihi pembayaran utang sebagai ucapan terima kasih dan tanpa perjanjian sebelumnya adalah boleh (halal). Diharamkan bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang peminjam berikan ketika mengembalikannya. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang

²² *Ibid*, 232.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.

sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang. Karena ini terhitung sebagai *alhusnul al-qada'* (membayar utang dengan baik).²⁴

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum utang piutang di atas baik dari firman Allah SWT dan hadist Nabi Muhammad SAW, utang piutang merupakan satu bentuk akad yang disyariatkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya adalah merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, bila dilakukan itu sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam tersebut.²⁵

3. Rukun Dan Syarat Utang Piutang

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.²⁶ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar'i dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah adanya *ijab* dan *qabul*, seperti jual beli dan *hibah*. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah.

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri.²⁷

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*,160.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1510.

²⁶ *Ibid*, 1510.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* , 160.

a. Rukun *Qardh*

Menurut ulama hanafiyah adalah ijab dan Kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :²⁸

- 1) Dua orang yang berakad yang terdiri dari : *muqaridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang).
- 2) *Qardh* (harta yang diutangkan)
- 3) Sighat *ijab* dan *kaful*.

b. Syarat *Qardh* :

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan :²⁹
 - a) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
 - b) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan *tabarru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama hanabilah merinci syarat *ahliyah attabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.
- 2) Harta yang diutangkan (*qardh*)
 - a) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'yat*),

²⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali, 2015), 233.

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 232.

harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.

- b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- c) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- e) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqaawwim*).
- g) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.³⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain dari perkara diatas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menatap ditanah, dan lain-lain.³¹

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti

³⁰ *Ibid*, 232-233.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, 162.

barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadist dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukarkan (*qardh*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar, atau ditimbang.

Jumhur ulama membolehkan, *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qardh* manfaat seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi ibn taimiyah memperbolehkannya.³²

c. Shighat ijab dan Kabul

Menurut ulama Hanafiyah, ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhoan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan, *qabul* adalah orang yang berkata setelah mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhoan atas orang pertama.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.³³

Dengan demikian *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islam.³⁴ Dan akad *ijab qabul* di dalam online sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi persyaratan itu sudah termasuk *ijab qabul* antara si nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah.

³² *Ibid.*

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 46.

³⁴ *Ibid*, 45.

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya *ijab dan qabul* berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridho” dan lain sebagainya.³⁵

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqaridh* (orang yang mnegutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba, seperti yang telah dijelaskan dalam hadist Nabi diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi SAW, sesungguhnya nabi berkata: “semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.³⁶

Jika tidak di syaratkan dan tidak ditemukan ada tambahan dalam pembayaran utang piutang, tidak termasuk riba. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihi pembayaran utangnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa seorang laki-laki telah menagih piutangnya kepada Nabi SAW di hadapan sahabat. Kemudian, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mebayar dengan yang sama. Sahabat menyatakan, tidak ada kecuali nilainya lebih dari yang diutangkan.

Adapun yang menjadi objek rukun dan syarat utang piutang itu sendiri adalah :

1) Aqid yaitu Kreditur dan Debitur

Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang piutang adalah orang yang

³⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 233.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*,163.

berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk kreditur yaitu *ahliyah* (kecakapan untuk melakukan tabarru dan mukhtar (memiliki pilihan). Sedangkan untuk debitur disyaratkan harus memiliki ahliyah (kecakapan) untuk melakukan muamalat, seperti baliqh, berakal dan tidak *mahjur'alaih*.³⁷

Sementara dalam fiqh Sunnah disebut bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (memilih) tidak sah, dan keabsahannya tergantung pada izin walinya.

Selain itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

2) *Ma'qud'alaih* yaitu uang atau barang

Selain adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang, maka perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan diutangkan. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b) Dapat dimiliki
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

³⁷ Chairuman Pasaribu, Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 136.

Perjanjian utang piutang disyariatkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayarannya.³⁸

Al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qardh*. Pertama, *qardh* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad *qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.³⁹

Pasal 612 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *qardh* pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan.

Ketentuan lain adalah Pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qardh*, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman.⁴⁰

Berbagai syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan diatas harus terpenuhi saat akad *qardh*. Sah atau tidak sah nya suatu akad tergantung terpenuhi rukun, syarat dan ketentuan yang berlaku.⁴¹

Perbedaan lagi dalam khiyar dan penangguhan, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam *qardh* tidak ada khiyar sebab maksud dari khiyar adalah membatalkan akad, sedangkan dalam *qardh* masing-masing berhak boleh membatalkan akad kapan saja dia mau. Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qardh* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*. Dengan

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*,165.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid*, 172.

⁴¹ *Ibid*, 173.

demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qardh* adalah derma, *muqridh* berhak meminta penggantian waktu itu. Selain itu, *qardh* pun termasuk akad yang wajib diganti dengan harta mitsil, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak. Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menanggukuhkan *qardh* pada empat keadaan :⁴²

- a) *Wasiat*, seperti mewasiatkan untuk penanggukan sejumlah harta dan ditanggukuhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantian dari muqtarid sebelum habis waktu setahun.
- b) *Diasingkan*, *qardh* diasingkan kemudian pemiliknya menanggukuhkan sebab penanggukan pada waktu itu diharuskan.
- c) Berdasarkan keputusan hakim.
- d) *Hiwalah*, yaitu pemindahan utang.

4. Waktu dan Sistem Pembayaran Utang Piutang dalam Islam

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji.

Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal iya mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.⁴³

a. Hukum Menunda Pembayaran Utang

Hukum menunda pembayaran utang dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Hukum menunda pembayaran utang adalah haram. Jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki *udzur* yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo.
- 2) Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 154.

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, 166.

mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah).

b. Dampak Negatif Utang Piutang

Utang dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan melakukannya. Diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
- 2) Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu.
- 3) Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- 4) Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang.
- 5) Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 128.

c. Faktor Pendorong Melakukan Utang

Dalam hal ini ada beberapa factor yang mendorong seseorang berutang, antara lain :⁴⁵

- 1) Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- 2) Kebiasaan berutang, sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak utang lagi.
- 3) Karena kalah judi, sehingga ia berutang untuk segera membayar kekalahanannya.
- 4) Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.
- 5) Untuk dipuji orang lain, sehingga berutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).

d. Etika Dalam Utang Piutang

Sebagian dari kita mengalami masa sulit ekonomi dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satunya dengan meminta tolong dipinjamkan uang (utang), dan akan mengganti uang tersebut pada jangka waktu tertentu. Namun tidak semua orang tahu peraturan tidak tertulis atau etika baik dalam utang piutang di masyarakat.⁴⁶

Adapun etika baik dalam utang piutang sebagai berikut :

- 1) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- 2) Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.

⁴⁵ *Ibid*, h.129.

⁴⁶ M Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 243.

- 3) Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan seseorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
- 4) Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan apabila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
- 5) Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.⁴⁷

e. Berakhirnya Perjanjian Dalam Utang Piutang

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berutang wajib menyegerakan melunasi utangnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya." (QS. Al-Isra [17:34])

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai masalah utang piutang maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu :

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 98.

1) Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang

Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada didalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui . (QS. Al- Baqarah [2:280])

Rasulullah telah bersabda: “mengulur-ulur waktu pembayaran utang bagi yang mampu adalah kezhaliman.” Jadi dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran utang dianggap sebagai sebuah kezhaliman apabila orang yang berhutang telah mampu membayarnya.

Adapun hukum utang piutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dengan catatan dia mampu untuk melunasi utangnya tersebut. Dan wajib hukumnya berutang jika dalam keadaan darurat, misal jika berutang maka dia akan meninggal dunia, dan menjadi haram jika tidak dalam keadaan darurat dan diyakini tidak mampu melunasi hutangnya tersebut.⁴⁸

2) Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, utang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010),

atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*misli*), bukan uang yang diterimanya.

3) Melebihkan Pembayaran

Melebihkan pembayaran dari jumlah utang yang diterima menjadi dua macam yaitu kelebihan yang tidak diperjanjikan dan kelebihan yang diperjanjikan.

Akad *qardh* termasuk ke dalam akad *tabarru'*, karena didalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, *muqridh* berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, nabi telah mengajurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, termasuk kedzaliman.

Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad, dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *qardh* oleh salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berkad atau dari pihak yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah swt yang artinya: *"wahai orang-orang yang berima! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu."* Dari arti diatas, menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁹

⁴⁹ Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia." *Al-Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786. (on-line), tersedia di

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (6 Juli 2021) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Apabila seseorang tidak mampu membayar utangnya, disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah swt pada hari kiamat.

Jika seseorang menukarkan (*iqtaradha*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis gandum kepada *muqridh* yang meminta zatnya. Jika *muqridh* tidak memintanya, *muqtaridh* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qarad* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, *muqtaridh* tidak memiliki qarad selama qarad masih ada. Pengembalian qarad pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat. Pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad qarad. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati qarad pada sifatnya.⁵⁰

5. Pembatalan Perjanjian Dalam Utang Piutang

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:⁵¹

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

Dasar hukum tentang jangka waktu perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi:

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 155.

⁵¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 4

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٩﴾

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah [9:4])

Berdasarkan ketentuan dari ayat di atas, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai pada batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

- b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 7 berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus

(pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah [9:7])

Dari ketentuan ayat diatas, terdapat pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

- c. Jika ada bukti kelancangan dan bukti penghiyanatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghiyanatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lain.

Dasar hukum tentang ketentuan diatas dapat didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 58 yang berbunyi:

وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْصِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

”Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. Al-Anfal [8:58])

Pembolehan pembatalan dalam hal kelancangan dan bukti penghiyanatan dapat dimengerti dari ayat yang berbunyi “jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu”. Dari bunyi ayat tersebut dapat dimengerti bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

Dalam perjanjian yang bersifat mengikat, perjanjian dapat berakhir apabila:

- 1) Ketika akad rusak
- 2) Adanya khiyar

- 3) Pembatalan akad
- 4) Tidak mungkin melaksanakan akad
- 5) Masa akad berakhir⁵²

6. Denda Dalam Hutang Piutang

Setiap akad yang berkaitan dengan hutang piutang atau sebuah akad yang didalamnya ada unsur kewajiban untuk membayar dalam bentuk uang, dimana dalam akad tersebut dimaksudkan denda. Seperti dalam akad qord, jual beli dengan tempo waktu dan akad salam dan lainnya.

Denda dalam akad hutang piutang yaitu adanya (ziyadah) bertambahnya nominal tertentu dalam sebuah akad terhadap nominal asli hutang ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan waktu yang sudah disepakati.

Seperti seseorang yang berhutang uang dengan membayar secara cicilan bulanan, dan disyaratkan dalam akad tersebut kepada penghutang, jika terlambat membayar cicilan dalam waktu yang telah disepakati maka baginya denda dengan nominal yang telah disepakati, atau dengan nisbah tertentu. Dihitung dari setiap bulan keterlambatannya.

Dan hukum denda pada akad hutang piutang adalah haram karena didalamnya terdapat unsure ziyadah terhadap nominal asli hutang tersebut, dan setiap ziyadah pada nominal hasil hutang adalah riba, menurut Jumhur Ulama.⁵³ Dan hukum haramnya ziyadah pada nominal asli hutang sama halnya tercantum pada akad maupun tidak.⁵³

C. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:⁵⁴

- a. Bertambah, karena salah satu perbutan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

⁵² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 70

⁵³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ,

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 57.

- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta, uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung.

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjaman. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁵⁵

Berdasarkan beberapa definisi riba yang ada terdapat sebuah ketegasan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil. Batil di sini adalah bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.⁵⁶

Dengan demikian, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad. Semua agama sama pada dasarnya melarang praktik riba, karena dapat menimbulkan dampak negative pada masyarakat umum dan bagi mereka yang terlibat. Adapun dampak negatif dari praktik riba dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat adalah:⁵⁷

- a. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
- b. Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya.
- c. Riba akan menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menggantungkan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkan.
- d. Memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama manusia.

⁵⁵ Isnani Harahap, yenni Samri, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta:Prenamedia Group, 2015), 189.

⁵⁶ Nurul Huda, Handi Risza Idris, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 239.

⁵⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 241.

- e. Menyebabkan hati orang yang terlibat riba menjadi guncang, perasaannya tumpul dan pikirannya kusut.

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negative yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.⁵⁸

2. Macam-Macam Riba

Macam-macam riba dan pengertiannya terbagi dalam dua kelompok besar :

a. Riba Utang Piutang (*riba dayn*)

Riba duyun adalah transaksi riba akibat utang piutang yang tidak memenuhi ketentuan syari'ah. Seperti adanya keuntungan bersama adanya resiko dan adanya keuntungan karena adanya biaya atau modal. Di dalam riba duyun atau riba utang piutang ini terbagi dua macam riba, yaitu :

1) Riba Qardh

Riba qard adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko.⁵⁹ Riba qardh yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.

2) Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian

⁵⁸*Ibid*, 143.

⁵⁹ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 133.

dimanfaat oleh kreditor untuk mengambil keuntungan. Dalam perbankan syariah cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba.

Oleh karena itu, ulama memberikan definisi riba jahiliyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.⁶⁰

b. Riba Jual Beli

Riba jual beli adalah jenis riba karena transaksi jual beli barang ribawi yang pertukaran barangnya tidak memenuhi kriteria sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Dalam riba jual beli terbagi dua macam riba, yaitu :

1) Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenisnya. Dengan kata lain riba *fadhl* merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Pada dasarnya, tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Islam, dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun, bila disyaratkan ada nilai lebih dalam proses jual beli atau pinjam meminjam benda sejenis ini maka hal itu termasuk riba *fadhl*.⁶¹

2) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang. Riba *nasi'ah* ini merupakan praktik riba yang nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang berutang. Akhirnya, jumlah utangnya akan membengkak, bahkan akan

⁶⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 94.

⁶¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 243.

mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga.⁶²

3. Proses Pelanggaran Riba dalam Al-Qur'an

Islam melarang praktik riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Allah SWT dalam mengharamkan riba dilakukan melalui empat tahapan.

Tahap Pertama, pada tahap ini Allah menunjukkan bahwa riba bersifat negative. Dalam QS. Ar-Rum [30:39]

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum [30:39])

Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Disini Allah menolak anggapan bahwa pinjama riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Tahap Kedua, Allah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi. Hal ini ditegaskan dalam QS An-Nisa [4:161].

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS An-Nisa [4:161]).

⁶² Ibid, 243.

Dalam ayat ini riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil. Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya.

Tahap Ketiga, pada tahap ini Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Sebagaimana digambarkan dalam QS. Al-Imran [3:130].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Imran [3:130]).

Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

Tahap Keempat, pada tahap ini turun QS. Al-Baqarah [275-276]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah [275-276]).

Dan QS. Al-Baqarah [278-279]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذِنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِنْ تُبْتِغُوْا فَلَکُمْ
رُءُوْسُ اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ ۚ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah [278-279]).

yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas dan jelas, dalam berbagai bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.⁶³

⁶³ Ibid, 245-248.

4. Sebab-Sebab Haramnya Riba

Sebab-sebab riba di haramkan ada banyak. Berikut ini rincian sebab-sebab tersebut :

- a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Al-Baqarah 275)”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali-Imran: 130)”

وَأَحْذَرُوا الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (An-Nisa: 161)

- b. karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya.
- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih

cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁶⁴

Menurut ulama ada berapa alasan diharamkannya riba, yaitu:⁶⁵

- a. Menurut tafsir al-mizan, alasan diharamkannya riba adalah karena adanya tambahan dalam utang piutang dan atau tambahan dalam tukar menukar barang yang sejenis. Karena itu perlu adanya standar penetapan nilai atau harga suatu barang disebabkan nilainya berbeda beda. Di sinilah perlunya uang.
- b. Menurut Al-Ghazali dalam kitab *ihya' ulum ad-din* dalam bab syukur, alasan diharamkannya riba adalah uang dibuat untuk dijadikan standar penetapan harga dan alat tukar. Uang itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik. Kalau uang itu memiliki nilai intrinsik, maka ia tidak akan memainkan peranan sebagai uang dan seperti barang-barang niaga yang lain, nilainya berbeda-beda karena berbedanya individu-individu yang menggunakannya (berdasarkan hukum *supply and demand*).
- c. Menurut Ath-Thabari, diharamkan *riba*, yaitu:⁶⁶
 - 1) Karena menggunakan uang tidak sesuai fungsinya itu menyebabkan berubahnya harta sedikit demi sedikit menjadi objek riba. Dengan kata lain, hal itu menyebabkan adanya sentralisasi kekayaan dan munculnya perbedaan kelas dalam masyarakat. Konsekuensi riba adalah munculnya para pemilik modal besar dan bertambah keuntungan terhadap modal.
 - 2) Riba menyebabkan bertambahnya modal perdagangan dan menjadikan potensinya lebih besar daripada yang sudah ada.
 - 3) Riba menyebabkan timbulnya kecongkakan dalam sebagian besar dan menundukkan sebagian lainnya. Dan yang tidak kuat akan binasa.

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 58-61.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 89-91.

⁶⁶ *Ibid*.

- d. Menurut Abu Zahrah dalam buku *Al-Islam wa Al-Musykilah*, alasan diharamkannya riba, yaitu larangan untuk menguasai kekayaan, dengan pemanfaatan harta milik orang lain secara zalim.

Dalam perspektif filsafat, sebab diharamkannya riba, yaitu:

- a. Riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain. Riba mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain. Sedangkan Islam menginginkan agar manusia berbuat baik terhadap sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan.
- b. Riba memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang yang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha.
- c. Riba menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan menghilangkan sumber daya manusia, dan sebagai akibatnya adalah terjadinya resesi ekonomi,
- d. Riba menjadi penyebab terpilahnya masyarakat ke dalam dua kelas, kelas produktif dan kelas non-produktif. Riba cenderung mengobarkan kelas produktif dan menjadikannya kelas non-produktif. Pada gilirannya hal ini melemahkan kelas produktif, bahkan menghapuskannya, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.
- e. Riba termasuk di antara bentuk-bentuk usaha para pemilik modal, yakni di antara keadaan-keadaan di mana sebagian orang tidak melakukan usaha tetapi hanya menanamkan modalnya. Sehingga secara lambat laun hilanglah persamaan sosial di antara anggota masyarakat.
- f. Riba, pada kenyataannya, adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat tukar. Uang itu sendiri tidak memberikan keuntungan, karena uang itu adalah mandul.

Hanabilah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba adalah jenis dan ukuran, yakni takaran bagi barang yang ditakar dan timbangan bagi barang yang dapat ditimbang. Pendapat ini merupakan riwayat yang masyhur di kalangan Hanabilah.

Malikiyah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba pada uang adalah masalah dan pada makanan adalah karena ia merupakan bahan pokok yang tersimpan, yakni menjadi kebutuhan manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang diinginkan.

Syafi'iyah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba pada emas dan perak karena keduanya dari jenis nilai. Adapun pada empat barang selain emas dan perak, maka alasannya adalah makanan, yaitu komoditi yang secara umum dimakan orang. Ini merupakan salah satu riwayat di kalangan Hanabilah.

Riwayat lain di kalangan Hanabilah menyatakan bahwa alasan diharamkan selain pada emas dan perak adalah bahwa ia merupakan makanan yang dapat ditukar atau ditimbang, maka tidak ada riba pada makanan yang tidak dapat ditukar dan tidak dapat ditimbang.⁶⁷

5. Hal-Hal yang Menimbulkan Riba.

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenisnya atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka di isyaratkan :⁶⁸

- a. Sama nilainya (*tamasul*).
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takaran maupun ukurannya.
- c. Sama-sama tunai di majelis akad.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.* 63.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Harahap, Isnani, yenni Samri, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Hasan, M Ali, Berbagai Transaksi dalam Islam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja, 2008.

Huda, Nurul, Handi Risza Idris, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Kurniawan, Asep, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Rosda , 2018.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali, 2015.

Mamang Sangadji, Etta, Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Renika Cipta, 2015.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia, 2014.

Moh Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Cv. Toha Putra, 1978.

Muhammad Teungku Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: pEtraya Mitrajaya, 2001.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta,: Rajawali Pers, 2016.

Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Semarang: Ghalia Indonesia,2012.

Pasaribu, Chairuman, Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rahman Ghazaly, Abdul, et. al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Rozalida, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2017.

R. Tjitrosudibyo, R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Sahroni, Oni, *Ushul Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, Bandung : Alfabeta, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru, 2020.

Sujarweni, Wiratna, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor : Kencana, 2003.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gitamedia 2005.

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Jurnal

Ayu Putri ” Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo dalam perspektif hukum Islam (Studi pada Aplikasi Kredivo).” Skripsi Program Sarjana Hukum di Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2020.

Diah Ayu, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online (Studi Kalangan Mahasiswa UINSA)”. Skripsi Program Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UINSA Surabaya, 2018.

Marinda Agesthia ”Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Letter Pada E-Commerce (studi pada E- Commerce).” Skripsi Program Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2020.

Mikhrozul Rachmat ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi pada Aplikasi Uang Teman).” Skripsi Program Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Rachmawati, Eka Nuraini. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia.” *Al-Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari”ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (6 Juli 2021) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Wawancara

Erna, “Pemilik Kosan Puri Arrifah”, *wawancara*, September 21, 2021.

Khusnul, “Praktik Shopee Pinjam Pada Pengguna Aplikasi Shopee”, *Wawancara*, Juli 7, 2021.

Melisah, “Praktik Shopee Pinjam Pada Pengguna Aplikasi Shopee”,
Wawancara, Juli 7, 2021.

Meri, “Praktik Shopee Pinjam Pada Pengguna Aplikasi Shopee”,
Wawancara, Juli 7, 2021.

Siti, “Praktik Shopee Pinjam Pada Pengguna Aplikasi Shopee”,
Wawancara, Juli 7, 2021.

Triana, “Praktik Shopee Pinjam Pada Pengguna Aplikasi Shopee”,
Wawancara, Juli 7, 2021.

Online

Queena, “Cara Mengaktifkan Shopee Pinjam” (on-line), tersedia di:
<http://www.viralorchard.com/cara-mengaktifkan0shopee-pinjam.html> (7 juli 2021)

Seller, “Bagaimana Cara Melakukan Pembayaran Shopee Pinjam”
(on-line), tersedia di:
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/3547.html> (7 Juli 2021).

Wikipedia, “Sejarah Shopee” (on-line), tersedia di:
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee.html> (7 juli 2021)